

PROFIL GENDER DAN PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Sri Marmoah

Universitas Batanghari, Jambi

marfuah_pt@yahoo.co.id

Abstrak

Kebijakan sekolah cenderung tidak ada nilai gender dan tidak ada penegasan kebijaksanaan yang diterapkan pada perluasan akses perempuan terhadap pendidikan berkelanjutan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, sekolah, atau pemerintah untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan dasar dan menengah tetap sedikit demi sedikit. Untuk itu perlu sinergi dalam mengembangkan kebijakan strategis, di mana peran pemerintah daerah sebagai inisiator kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena ini di dalam rangka siswa sekolah untuk mengidentifikasi tentang usia, jenis kelamin, dan jenis sekolah yang mereka hadiri. Penelitian ini membahas ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kabupaten Jambi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan perempuan dipengaruhi oleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan nilai di masyarakat. Nilai yang ada di kabupaten Jambi membentuk stereotip negatif yang menyebabkan wanita marginalisasi, subordinasi dan bekerja over load.

Kata Kunci: Gender, Pendidikan

Abstract

The policies of a school tend to be no gender value and no a wise affirmation applied to the broadening of women's access to continuing education to a higher level. The efforts made by the community, school, or government for the extend of women's access to primary and secondary education remains piecemeal. For that we need the synergy in developing strategic policies, where the role of local government as a policy initiator. The purpose of study is to investigate this phenomenon at the school student's in order to identify about age, gender, and type of school they attend. This research discusses gender inequality in education in Jambi district, by using an explanative qualitative approach. The result of the study shows that there is a gender inequality in women education influenced by the access, participation, control, benefits, and value in the community. The existing value in Jambi district forms a negative stereotype that causes women marginalization, subordination and over-load work.

Key Words: *Gender, Education*

A. Pendahuluan

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. UUD 1945 yang secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu UUD 1945 beserta amandemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguatan komitmen Pemerintah Indonesia serta penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965*) telah diratifikasi dengan UU Nomor 29 Tahun 1999; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait sejalan dengan Konvensi internasional tersebut.

Salah satu kebijakan "*Education for All*" yang telah disepakati semua negara anggota UNESCO termasuk Indonesia adalah menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah, dan mencapai kesetaraan pendidikan tahun 2015. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan merupakan salah satu strategi agar semua kebijakan, program, proyek, ataupun kegiatan di bidang pendidikan diarahkan untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan gender. Untuk mendukung kebijakan tersebut, tenaga pendidikan mempunyai peran strategis. Pendidikan yang bias gender menimbulkan stereotipe peran perempuan dan laki-laki yang umumnya kurang menguntungkan perempuan. Bila tidak dilakukan perubahan secara strategis dan sistematis, akan terhambat pembangunan di segala aspek kehidupan. Laporan terkini Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender telah meningkat di seluruh Kawasan Asia Timur dan Pasifik, disparitas gender masih tampak pada beberapa bidang utama.

Menurut laporan “*Toward Gender Equality in East Asia and the Pacific*” (Menuju Kesetaraan Gender di Asia Timur dan Pasifik), meningkatkan akses perempuan terhadap peluang kerja dan ekonomi dapat mendorong produktifitas secara signifikan di kawasan.

Sebagai agen perubahan, perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang sama, setara dan adil terhadap partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan. Konstruksi sosial gender yang ada di dalam masyarakat dapat menjadi masalah dibidang pendidikan apabila terdapat persoalan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan (Kemendiknas, 2010:41). Peserta didik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dewan pendidikan, dan komite sekolah serta orang tua memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam memperoleh manfaat dari pelayanan pendidikan sehingga dapat menurunkan angka kesenjangan partisipasi dalam pendidikan. Upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pemerintah telah mengupayakan perbaikan atau pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan yang dilandasi oleh berbagai kesepakatan, baik ditingkat global/dunia maupun kesepakatan nasional. Landasan tersebut antara lain:

- 1) Millenium Development Goals 2000 (MDG's),
- 2) Kesepakatan Dakar tentang Pendidikan Berkeadilan Gender,
- 3) Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
- 4) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah,
- 5) Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan.

Tema penulisan ini dipilih dengan alasan peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh sikap kesetaraan gender terhadap perilaku pengimplementasian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di sekolah-

sekolah baik negeri maupun swasta. Sekolah pada jenjang tersebut dipilih karena tujuan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada dasarnya lebih ditekankan untuk pendidikan dari tingkat prasekolah sampai sekolah menengah atas. Dari sekolah inilah nantinya dapat dilihat seberapa besar partisipasi perempuan maupun laki-laki yang berkesempatan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan implementasi kebijakan PUG di sekolah tidak terlepas dari bagaimana perilaku kinerja guru tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dituangkan dalam bentuk tulisan tentang profil pendidikan berbasis gender Kota Jambi dengan mengacu kepada data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gender

Menurut Unger & Crawford (1992) gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki yang dikonstruksi secara sosial bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Hal yang hampir sama dikemukakan Moser (1993) gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan menurut Grewal & Kaplan, (2002), gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah

Sementara itu menurut Mosse (1996) gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya. Menurut Ostergaard (1992) gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dominasi dalam struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama, dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Bradley (2007), gender adalah suatu konstruksi sosial yang

mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis.

2. Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Menurut Suryadi & Idris, (2004), ada tiga hal permasalahan yakni: kesempatan, jenjang, dan kurikulum. Sedangkan menurut Suleman (1995), ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam *Sosiokonsepsia* Vol. 90 17, No. 01 2012. Ketidaksetaraan Gender dalam pendidikan mengecap pendidikan formal. Menurut Van Bemmelen (1995), mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah.

Faktor yang menjadi alasan pokok yang penyebab ketidaksetaraan gender menurut Suleman (1995) yaitu: 1). Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia, 2). Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya untuk bersekolah, 3). Investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah. Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan menurut Van Bemmelen (2003) meliputi: 1). Akses perempuan dalam pendidikan, 2). Nilai gender yang dianut oleh masyarakat, 3). Nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, 4). Nilai gender yang ditanamkan oleh guru, 5). Kebijakan yang bias gender.

Suryadi dan Idris (2004) mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan kedalam empat aspek yaitu: 1). Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, 2). Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, 3). Kontrol adalah penguasaan

atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, 4). Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal. Studi yang dilakukan Suryadi (2001) menemukan bahwa pilihan keluarga yang kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan alasan biaya, bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan (*rate of return*) terhadap pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akses perempuan dalam pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, nilai gender yang ditanamkan oleh guru, kebijakan yang bias gender, akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, dan manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.

3. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Menurut Menurut Mansour Fakih, (1999:147-150), dijelaskan bahwa perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan dimana ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban kerja ganda (*double burden*). Dari akar permasalahan ketidakadilan gender tersebut telah memunculkan konsep PUG (Pengarusutamaan Gender). Berdasarkan pemaparan Dermawan dalam seminarnya yang berjudul "PUG dan Analisis Gender" bahwa PUG merupakan strategi untuk menjadikan kepentingan laki-laki dan perempuan masuk dalam bagian integral dalam siklus rancangan pembangunan mulai dari perencanaan sampai penganggarannya sehingga laki-laki dan perempuan mendapat manfaat yang sama. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama

dari proses pembangunan. Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan maupun laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), maka Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh Lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Meskipun begitu usaha untuk mencapai KKG ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh perempuan. Akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya. Strategi tersebut dikenal dengan istilah “Gender Mainstreaming” (GMS) atau “Pengarusutamaan Gender” (PUG). Strategi ini sangat penting sehingga pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dengan PUG ini, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki.

Menurut Sinta R. Dewi (2006:12-13), ada tiga prinsip utama dalam PUG yaitu menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, prinsip demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dan prinsip *fairness, justice and equity* (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan). PUG itu sendiri harus terjadi dalam empat tingkat yaitu individual/personal, sosial, nilai-nilai informal yang terbentuk dalam budaya, dan praktik-praktik agama serta aturan formal institusi. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 menjadi satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional dan desakan masyarakat agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sesuai dengan Inpres No. 9/2000, sasaran utama PUG adalah” lembaga pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki dan SDM yang tersedia di tingkat Pusat sampai di lini lapangan, terutama yang berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan, serta para perencana program yang terlibat dalam

PUG, antara lain adalah: organisasi swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia yang mencakup rumah tangga, masyarakat, dan negara, melalui kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

C. Profil Pendidikan Berbasis Gender

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Terdapat 3 (tiga) pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS) di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumber daya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan atau faktor ekonomi. Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam dimensi gender, perlu disajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak, dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu dianjurkan pula bahwa orang tua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama.

Dalam pembahasan ini akan menyajikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Kota Jambi yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yang meliputi jumlah murid SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Jambi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Jambi (2015), jumlah murid pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.1, berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

Tabel 1
Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Kota Jambi

No	Kota Jambi	Total												Total
		Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3		Tingkat 4		Tingkat 5		Tingkat 6		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Total		5,756	5,385	5,782	5,299	5,696	5,164	5,526	5,163	5,668	4,931	5,425	5,005	64,800
1	Kec. Kota Baru	1,390	1,295	1,386	1,240	1,347	1,176	1,309	1,181	1,273	1,088	1,180	1,158	15,023
2	Kec. Jambi Selatan	1,107	1,015	1,030	1,006	1,085	982	1,048	1,014	1,141	927	1,110	921	12,386
3	Kec. Jelutung	669	634	654	636	610	582	632	583	637	552	610	574	7,373
4	Kec. Pasar Jambi	191	179	212	180	193	188	218	178	215	190	215	196	2,355
5	Kec. Telanai Pura	1,097	1,033	1,134	1,098	1,195	1,084	1,124	1,070	1,185	1,091	1,098	1,048	13,257
6	Kec. Danau Teluk	104	123	115	115	104	81	95	120	106	109	120	83	1,275
7	Kec. Pelayangan	100	108	117	91	110	93	91	103	109	86	89	95	1,192
8	Kec. Jambi Timur	1,098	998	1,134	933	1,052	978	1,009	914	1,002	888	1,003	930	11,939
Total		5,756	5,385	5,782	5,299	5,696	5,164	5,526	5,163	5,668	4,931	5,425	5,005	64,800

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2015

Terlihat pada tabel 1 perbandingan jumlah siswa Sekolah Dasar antara laki-laki dan perempuan di Kota Jambi belum berimbang, artinya laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan untuk sekolah jika dibandingkan dengan siswa perempuan.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta

Tabel 2
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Jambi

No	Kota Jambi	Negeri						Swasta						Total
		Tingkat 7		Tingkat 8		Tingkat 9		Tingkat 7		Tingkat 8		Tingkat 9		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Total		3,143	3,250	3,006	3,206	2,893	3,059	1,259	1,042	1,311	1,096	1,299	1,237	25,801
1	Kec. Kota Baru	997	937	943	902	890	902	71	50	100	63	74	39	5,968
2	Kec. Jambi Selatan	466	439	496	527	421	450	335	273	331	283	362	353	4,736
3	Kec. Jelutung	166	166	160	207	145	186	141	113	115	104	117	110	1,730
4	Kec. Pasar Jambi	245	293	217	276	234	281	71	36	53	45	51	58	1,860
5	Kec. Telanai Pura	617	739	574	703	557	622	420	368	449	346	412	434	6,241
6	Kec. Danau Teluk	62	63	46	58	54	45	0	0	0	0	0	0	328
7	Kec. Pelayangan	1	12	4	10	13	10	0	0	0	0	0	0	50
8	Kec. Jambi Timur	589	601	566	523	579	563	221	202	263	255	283	243	4,888
Total		3,143	3,250	3,006	3,206	2,893	3,059	1,259	1,042	1,311	1,096	1,299	1,237	25,801

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2015

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta

Tabel 3
Jumlah Siswa SMA Kota Jambi

No	Kota Jambi	Negeri						Swasta						Total
		Tingkat 10		Tingkat 11		Tingkat 12		Tingkat 10		Tingkat 11		Tingkat 12		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Total		1,640	2,293	1,305	1,774	1,313	1,780	803	852	845	919	895	1,002	15,421
1	Kec. Kota	656	851	500	725	550	725	12	15	15	23	27	22	4,121
2	Kec.	0	0	0	0	0	0	248	222	249	228	241	230	1,418
3	Kec.	112	225	114	171	62	147	122	154	106	99	80	93	1,485
4	Kec.	481	693	402	488	389	475	304	330	358	413	415	457	5,205
5	Kec.	72	64	53	63	62	80	0	0	0	0	0	0	394
6	Kec.	319	460	236	327	250	353	117	131	117	156	132	200	2,798
Total		1,640	2,293	1,305	1,774	1,313	1,780	803	852	845	919	895	1,002	15,421

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2015

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta

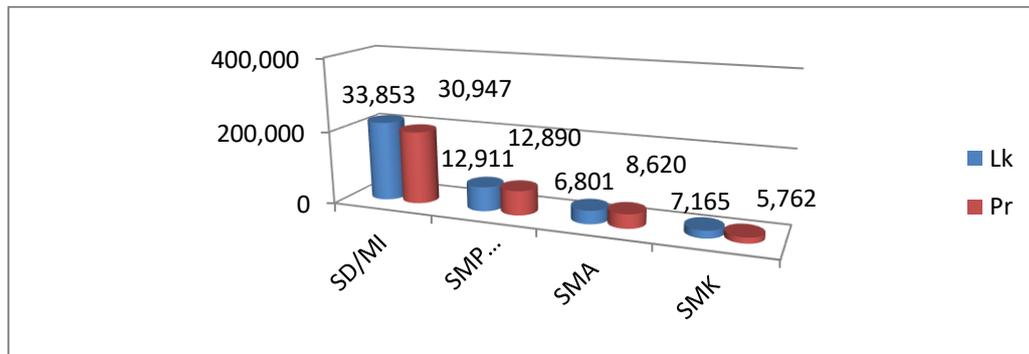
Tabel 4
Jumlah Siswa SMK Kota Jambi

No	Kota Jambi	Negeri								Swasta								Total
		Tingkat 10		Tingkat 11		Tingkat 12		Tingkat 13		Tingkat 10		Tingkat 11		Tingkat 12		Tingkat 13		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Total		1,166	934	911	928	779	839	0	0	1,293	994	1,445	951	1,571	1,116	0	0	12,927
1	Kec. Kota	622	5	446	8	402	5	0	0	316	99	353	97	551	108	0	0	3,012
2	Kec.	254	348	263	378	201	301	0	0	441	461	434	333	395	403	0	0	4,212
3	Kec.	0	0	0	0	0	0	0	0	62	34	100	33	82	39	0	0	350
4	Kec.	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1	85	6	57	6	0	0	200
5	Kec.	259	568	171	522	146	524	0	0	186	133	207	173	203	216	0	0	3,308
6	Kec.	31	13	31	20	30	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
7	Kec.	0	0	0	0	0	0	0	0	243	266	266	309	283	344	0	0	1,711
Total		1,166	934	911	928	779	839	0	0	1,293	994	1,445	951	1,571	1,116	0	0	12,927

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2015

Masih banyak penduduk Kota Jambi yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, terlihat pada tabel 1 bahwa ketika pendidikan tingkat sekolah dasar jumlah murid SD laki-laki dan perempuan terbanyak dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi instansi yang terkait dengan pendidikan khususnya Dinas Pendidikan Kota Jambi, untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang lebih banyak agar dapat menampung siswa pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan di Kota Jambi berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1
Perbandingan Murid Laki-laki dan Perempuan di Kota Jambi



D. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Permasalahan Gender Bidang Pendidikan

Faktor-faktor penyebab bias gender menurut Suryadi (2003:9-12) dapat dikategorisasikan ke dalam tiga aspek, yaitu partisipasi, akses, dan kontrol. Namun, tidak semua aspek yang disebutkan dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing bias gender yang terjadi secara empiris dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain faktor-faktor penyebab bias gender akan sangat tergantung dari situasinya masing-masing. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab bias gender berkaitan dengan perolehan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan adalah:

1. Partisipasi

Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD dan SMP dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur karena fasilitas pendidikan tersebut sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor struktural itu diantaranya adalah nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah pinggiran yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki.

2. Akses

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender yang berhubungan dengan akses dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah karena akses perempuan juga masih dirasakan rendah dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepada sekolah perempuan secara konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan.
- b. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembelajaran cenderung bias laki-laki. Fenomena ini dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. Penulis buku laki-laki sangat dominan.
- c. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan dari sebagian buku-buku pelajaran (khususnya IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya berkaitan dengan konsep keluarga atau peran perempuan dalam keluarga yang telah lama dipengaruhi oleh cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi reproduksi.

Akses pada jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan di Kota Jambi telah mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan. Untuk jenjang SD rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada sekitar angka 94,15. Namun demikian rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang SMP tahun 2015 selalu kurang dari 100 persen. Dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki tampak bahwa partisipasi perempuan pada jenjang SMP lebih tinggi dibanding laki-laki dengan rasio sebesar 88,88 pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa

partisipasi penduduk perempuan pada kelompok miskin cenderung lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

Akses pada jenjang pendidikan menengah, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan fluktuasi yang cukup besar di Kota Jambi. Selain itu akses dapat dilihat dari Indeks Paritas jumlah siswa perempuan dan laki laki cenderung menurun di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Indeks Paritas pada tingkat TK menunjukkan kesetaraan gender, sedangkan Indeks Paritas SMA menunjukkan ketidaksetaraan gender di pihak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender yang semakin tinggi di pihak perempuan. Indeks Paritas angka IPK perempuan dan laki laki cenderung stabil di angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan gender. Hanya terdapat ketidaksetaraan gender di pihak laki-laki di tingkat TK.

Indeks Paritas APS usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun mengalami ketidaksetaraan gender di pihak perempuan. Sedangkan IP APS usia 13-15 tahun mengalami kesetaraan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa APS dengan usia semakin tinggi menyebabkan pergeseran menuju kearah kesenjangan gender di pihak perempuan. Indeks Paritas angka PSB cenderung menurun di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Indeks Paritas pada tingkat SD dan SMA menunjukkan ketidakkesetaraan gender di pihak perempuan, sedangkan Indeks Paritas SMP menunjukkan kesetaraan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender yang semakin tinggi di pihak perempuan. Terdapat kecenderungan menarik yang dapat dilihat dalam Indeks Paritas angka buta huruf. Indeks Paritas angka buta huruf semakin terjadi kesenjangan di pihak laki-laki dengan semakin bertambahnya usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian buta huruf yang semakin tinggi dengan semakin bertambahnya usia.

3. Kontrol

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang kurangnya kontrol kebijakan pendidikan adalah: khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama di sektor

swasta sangat dirasakan kesenjangan gender. Kenyataan menunjukkan bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik pemerintah maupun swasta, maka salah satunya harus memilih untuk keluar, dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari faktor-faktor bias gender dalam bidang pendidikan.

4. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya memilih fungsi-fungsi produksi. Laki-laki dianggap lebih berperan sebagai fungsi penopang ekonomi sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.
5. Orang yang akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang paling nyata adalah siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga dan teman-teman atau guru). Manfaat yang akan diperoleh siswa mudah sekali untuk dijelaskan, siswa yang belajar membaca di sekolah lebih baik daripada mereka yang tidak dapat membaca.

E. Isu Kesenjangan Gender

Isu gender di era global adalah masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa, yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan. Istilah Gender sendiri menurut Oakley (1972) dalam *Sex, Gender dan Society* berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (sex) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanent dan universal berbeda.

Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban ganda dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.

a. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi

Gelombang perdagangan bebas dikendalikan oleh pemilik modal dengan serakah. Marginalisasi dan penindasan bagi kaum mustadh'afin menjadi buruh yang dieksploitasi. Penindasan dan pemarginalan terhadap kaum dhuafa' dan masakin sering dilakukan oleh kelas-kelas dominan. Elit keagamaan menjadi bagian dari proses de-humanisasi. Bersandar pada realitas seperti itu, maka menghadirkan agama sebagai rahmat alilamin bagi seluruh umatnya menjadi sebuah keharusan untuk menghadang dan membendung kemungkaran sosial.

b. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik.

Perampasan daya sosial mencakup perampasan akses seperti informasi, pengetahuan, pengembangan keterampilan dan potensi kolektif, serta partisipasi dalam organisasi dan sumber-sumber keuangan. Perampasan daya politik meliputi perampasan akses individu pada pengambilan keputusan politik, termasuk kemampuan memilih dan menyuarakan aspirasi serta bertindak kolektif. Tekanan ini lebih merupakan akibat dari operasi watak otoritarian rezim dan pendukung koersifnya. Kebisuan ini yang harus dibongkar. Perampasan daya psikologis mencakup tekanan eksternal yang menyebabkan hilangnya perasaan individual mengenai potensi dirinya dalam kancah sosial-politik, sehingga individu itu tidak punya peluang untuk berpikir kritis. Tekanan eksternal itu diinternalisasi si miskin menjadi kesadaran palsu. Mereka percaya bahwa mereka miskin dan bodoh, tidak bisa apa-apa, selain mengandalkan orang lain untuk mengubah keadaannya.

c. Pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif.

Stereotipe yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan.

d. Kekerasan (*violence*).

Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami, ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, atau majikan.

e. Beban kerja yang panjang dan lebih banyak (*burden*). Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

f. Sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Yusuf Supiandi membeberkan bagaimana ketidaksetaraan gender itu memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan. Misalnya, investasi terhadap SDM, khususnya anak-anak dan perempuan dalam pendidikan dan kesehatan. Perempuan yang berpendidikan dan mempunyai kesehatan yang baik akan mempunyai kesempatan untuk aktif bekerja secara produktif pada sektor-sektor formal serta akan menikmati pendapatan yang baik dibanding dengan perempuan yang tidak punya pendidikan dan sakit-sakitan. Selain itu, perempuan yang punya pendidikan akan memberikan perhatian yang lebih besar pada anak-anaknya yang merupakan investasi bagi masa depan anak-anak. Studi – studi tentang gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi

akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan.

F. Identifikasi Kesenjangan Gender

Bila ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan gender di bidang pendidikan di Kota Jambi amatlah kompleks. Secara umum faktor-faktor penghambat kesetaraan gender antara lain berkaitan erat dengan:

- a. Sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga (beban kerja domestik).
- b. Pendidikan belum memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua (motivasi rendah).
- c. Masih terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan SMP, SMA, PT dengan mutu baik dan biaya murah.
- d. Proses pembelajaran, bahan ajar, ilustrasi yang masih bias gender.
- e. Ekonomi keluarga yang kurang menguntungkan.

Bias gender dalam bidang pendidikan merupakan isu penting. Sebagaimana diketahui bahwa bias gender merupakan pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin dibanding jenis kelamin lainnya. Pandangan dan sikap semacam ini jika terjadi dalam pendidikan akan menjadi sebuah kebenaran yang terajarkan. Oleh karena itu, proses pendidikan seringkali dianggap sebagai media legitimasi terhadap berbagai akar persoalan gender. Lebih dari itu, bias-bias yang terjadi pada akhirnya akan mengakibatkan kesenjangan gender di bidang pendidikan. Kesenjangan gender yang terjadi di bidang pendidikan, sangat terkait dengan adanya stereotype, mitos atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan gender bidang pendidikan nasional yang telah dilaksanakan selama ini sebagaimana diketahui, disamping menunjukkan kemajuan, secara tidak disadari pembangunan pendidikan telah menimbulkan persoalan. Persoalan yang terkait dengan kesenjangan gender yang cukup menonjol, antara lain :

- 1) makin tinggi jenjang pendidikan, makin menurun angka partisipasi penduduk perempuan dibanding partisipasi laki-laki.
- 2) adanya studi/program yang dimitoskan cocok untuk kaum perempuan (*soft sciences*) atau hanya cocok untuk kaum laki-laki saja (*hard sciences*)
- 3) masih banyaknya bahan ajar yang bias gender,
- 4) proses pembelajaran yang dianggap melecehkan kaum perempuan,
- 5) belum proposionalnya kesempatan guru TK/SD perempuan untuk promosi jabatan struktural dan lain-lain.

Masalah-masalah tersebut lambat laun akan menjadi salah satu sumber munculnya permasalahan dalam kehidupan sosial yang lebih kompleks. Isu kesenjangan gender yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi jenjang pendidikan makin lebar kesenjangan gendernya.
- 2) Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan terbatasnya pemahaman para pengelola dan pelaksana pendidikan akan pentingnya kesetaraan gender;
- 3) Masih terjadi gejala segregasi gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi di Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan
- 4) Di daerah pedesaan anak perempuan didorong untuk menikah dan meninggalkan sekolah.

G. Penyebab Kesenjangan Gender

Masalah gender atau pemilahan peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya melalui pembiasaan, sosialisasi, budaya dan pewarisan budaya sejak anak dilahirkan ke dunia yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Pada prinsipnya gender bisa berbeda dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat sehingga tidak bisa berlaku universal dan tetap menetap (Suryadi dan Idris, 2004). Teori evolusi, menurut teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-menerus tanpa berhenti. Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan yang menghendaki kesetaraan, yang harus di respon oleh umat manusia dalam rangka

adaptasi dengan alam. Berdasarkan teori ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena lamanya menuntut demikian. Sekarang tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga karena alam menuntut demikian disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan peran laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan. Pengambilan keputusan bersifat kompleks, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: a). Fisik didasarkan pada rasa yang dialami tubuh seperti rasa sakit, tidak nyaman atau nikmat. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang atau sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan; b). Emosional didasarkan oleh perasaan dan sikap. Orang akan bereaksi pada suatu; situasi secara subjektif; c). Rasional didasarkan pada pengetahuan. Orang-orang mendapat informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya; d). Praktikal didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakannya. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak; e). Interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan-jaringan sosial yang ada. Hubungan antara satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual; f). Struktur didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritiksuatu tingkah laku tertentu.

Jenis-jenis pengambilan keputusan antara lain:

1. Pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apa-apa karena ketidaksanggupan atau merasa tidak sanggup
2. Pengambilan keputusan intuitif sifatnya segera, langsung diputuskan karena keputusan tersebut dirasakan paling tepat
3. Pengambilan keputusan yang terpaksa karena harus segera dilaksanakan
4. Pengambilan keputusan yang reaktif seringkali dilakukan dalam situasi marah atau tergesa-gesa
5. Pengambilan keputusan yang ditangguhkan, dialihkan pada orang lain yang bertanggung jawab

6. Pengambilan keputusan secara berhati-hati dipikirkan baik-baik, mem pertimbangkan berbagai pilihan

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis gender di Kota Jambi, sebagai berikut,:

1. Konsep gender.

Gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

2. Bentuk ketimpangan gender di bidang pendidikan.

Ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kuantitatif sebagai berikut,:

- 1) Angka buta huruf, melek huruf merupakan syarat utama untuk berpartisipasi dalam kehidupan modern dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Di Kota Jambi, jenjang pendidikan formal menunjukkan perbedaan gender yang tidak terlalu tajam. Jenjang pendidikan formal SD, SMP, dan SMA, perempuan secara umum terdapat kesetaraan gender terhadap laki-laki, sebaliknya tingkat pendidikan tinggi (S1/S2) laki-laki lebih tinggi dari perempuan.
- 2) Angka partisipasi sekolah. Dalam angka partisipasi sekolah terdapat tiga alasan pokok yang menyebabkan ketimpangan gender yaitu :
 - a. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal semakin terbatas jumlah sekolah.
 - b. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan.

- c. Investasi pendidikan formal bagi perempuan kerap kali tidak banyak dirasakan oleh orang tua, karena anak perempuan setelah menikah akan menjadi anggota keluarga suaminya

3. Pilihan bidang studi

Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau keterampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri dan seolah-olah secara khusus kaum laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumah-tangga.

4. Komposisi staf pengajar dan kepala sekolah.

Komposisi tenaga pengajar pada mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), SD, dan SMP didominasi oleh tenaga pengajar perempuan. Sedangkan untuk SMA/SMK, tenaga pengajar laki-laki lebih dominan dari pada tenaga pengajar perempuan. Kecenderungan yang serupa juga terlihat di kalangan kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bradley, H. (2007). *Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, (2006). *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar.
- Fakih, Mansour, (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Insist Press.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, (2001). *Enam Pemaknaan Gender*. Makalah, h. 6
- Inpres No. 9 tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*
- Karim, Abdul Gaffar, (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan,(2006). *Modul Fasilitasi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Fasilitator kategori Pengembangan*. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2009). *Beijing Platform For Action*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan
- Mandy Mcdonald, et all, (1999). *Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek*, diterjemahkan oleh Inatan Naomi. Yogyakarta: INSIST, h. 126
- Mansour, Fakih, (1996). *Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 10
- , *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar p.7-8.
- , (1999). *Gender Mainstreaming Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan” dalam Gender dan Perubahan Organisasi, Menjembatani*

- Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek*, Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST, h. xxxiii
- Moore, H L. (1998). *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moser, CON. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London : Routledge
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar.
- Muawanah, Elfi dan Rifa Hidayah, (2006). *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar,
- Nasution, S. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nurhaeni, I. D. (2009). *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Surakarta : UNS Press.
- Noeng Muhadjir.(2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 68-69.
- Ostergaard, L. (1992). *Gender and Development Apractical Guide*. New York : Routledge.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Ratna Saptari & Brigitte Halzner, (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, h. 154
- Raharjo, Yulfita. (1991). *Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita*. dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang. (1991). *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI
- Sinta, D, (2006). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional
- Suleeman, E. (1995). *Pendidikan Wanita di Indonesia, Dalam T. O. Ihromi, Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (hal. 227-248). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supiandi, Yusuf. (2001). *Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender*, Jakarta:Kantor Meneg PP.
- Suryadi, A. (2001). *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Bappenas & WSPII-CIDA.
- Suryadi, A, & Idris, E. (2004). *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT. Ganesindo.

- S.P. Robbins, at.al., (1998). *Organisational Behavior*. (Sydney: Prentice Hall, h. 537
- Sosiokonsepia Vol. 17, No. 01 2012 89. *Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan*
- Tim Penulis PSW UIN Syarif Hidayatullah, (2003). *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN SYAHID.
- Tim Peneliti PSG UIN Malang, (2006). *Baseline Study dan Analisis institusional Kesetaraan Gender Di UIN Malang*, Malang: Lemlit UIN Malang.
- UU No. 20/2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
- Unger, R., & Crawford. (1992). *Women and Gender a Feminist Psychology*. New York : McGraw_Hill Inc.
- Van Bemmelen, S. (1995). *Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru? Dalam T. Ihromi, Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (hal. 175-226). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Women's Studies, New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Zaitunah Subhan, (1999). *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*. Yogyakarta: LKiS